

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA TANJUNGPINANG

Oleh
Defriyadi Eka Bhakti
NIM. 170565201016

ABSTRAK

Persoalan genangan banjir tidak lagi asing bagi masyarakat di Kota Tanjungpinang. Permasalahan yang ada karena masih banyak titik-titik banjir yang belum tertangani sepenuhnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan banjir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dalam Pengendalian Banjir pada tahun 2020, 2021 dan 2022 menggunakan teori menurut Soerjono Soekanto (2013) dengan 3 (tiga) indikator yaitu; Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, dan Pembinaan, Pengawasan serta evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian bahwa Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari penyusunan kebijakan yang masih mengacu pada Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan belum menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya airnya sendiri hingga ketersediaan *masterplan* yang belum ada. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan untuk menangani titik genangan tidak bisa ditangani secara menyeluruh yang membuat penanganan titik genangan hanya bisa diatasi satu titik. pengawasan yang dilakukan hanya dalam proses pembangunan, namun dalam pengawasan rutin yang dilakukan untuk mengecek drainase perkotaan yang mengalami permasalahan seperti kerusakan maupun endapan tidak dilaksanakan.

Kata Kunci: Peran Dinas, Banjir, Pengendalian Banjir.

**THE ROLE OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING SERVICES
IN FLOOD CONTROL IN THE CITY OF TANJUNGPINANG**

By
Defriyadi Eka Bhakti
NIM. 170565301016

ABSTRACT

The problem of flood collection is no longer foreign to the people of Tanjungpinang City. The problem exists because there are still many flood spots that have not been fully handled. The Tanjungpinang City Public Works and Spatial Planning Service has the task of planning, developing and building infrastructure related to flooding. The aim of this research is to determine the role of the Tanjungpinang City Public Works and Spatial Planning Department in Flood Control in 2020, 2021 and 2022 using theory according to Soerjono Soekanto (2013) with 3 (three) indicators, namely; Policy preparation, policy implementation, and guidance, monitoring and evaluation. The method used in this research is a qualitative descriptive method with 5 informants and using data collection techniques and tools in the form of interviews, observations and documents. The research results show that the role of the Tanjungpinang City Public Works and Spatial Planning Department has not been maximized. This can be seen from the formulation of policies which still refer to Law 17 of 2019 concerning Water Resources and have not yet developed their own water resources management policies and the availability of a master plan that does not yet exist. Budget limitations in the implementation of handling collection points cannot be resolved thoroughly, which means point handling can only handle one point. supervision is carried out only during the construction process, but routine supervision carried out to check drainage drainage which is experiencing problems such as damage or sedimentation is not carried out.

Keywords: Role of Department, Flood, Flood Control.